

## Implementasi Prinsip Partisipasi dan Transparansi dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Cinta di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Kapuas

Arbainsyah<sup>1</sup>, Ibnu Elmi S. Pelu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya

arbainsyah.2510310047@uin-palangkaraya.ac.id<sup>1</sup>

ibnu elmi@uin-palangkaraya.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The development of the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in today's educational context no longer focuses solely on achieving students' cognitive aspects, but also emphasizes strengthening the values of compassion, tolerance, and character building, supported by good educational governance. Most previous research still focused in the learning dimension in implementing the PAI curriculum. Studies that specifically integrated a love-based PAI curriculum with the principles of good governance, especially regarding stakeholder participation and transparency in the educational decision-making process, is still relatively limited. This study aimed to analyze the implementation of the principles of participation and transparency in the development of the Love-Based Islamic Religious Education Curriculum at Islamic Madrasah Tsanawiyah in Kapuas Regency. The study used a qualitative approach with a field research, through observation, interviews, and documentation techniques with madrasah principals and stakeholders at two madrasahs. Data were analyzed through stages of reduction, presentation, and drawing conclusions with source triangulation. The results indicates that the application of the principles of participation and transparency in curriculum development takes place through deliberation mechanisms, teacher council forums, and policy socialization to parents of students, while information transparency is supported by reporting learning outcomes through a digital system. Based on the spectrum Arnstein's Ladder of Citizen Participation, the level of stakeholder participation is at the stage consultation going to partnership, as indicated by the existence of consultation and the expression of aspirations in good governance forums, yet strategic authority still rests with madrasah leaders. This finding indicates that participatory practices have gone beyond the informative stage, but have not yet fully achieved equal power sharing. Another dimension, the effectiveness of curriculum implementation is influenced by limited human resources, the use of technology, and the more evenly distributed teacher readiness within the madrasah environment. This finding emphasizes the importance of strengthening teacher capacity, supporting technology access, and developing participation mechanisms to realize more participatory and transparent madrasah curriculum governance.*

**Keywords :** Good Governance, Islamic Education, Curriculum Based On Love, Participation And Transparency.

### ABSTRAK

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada konteks pendidikan masa kini tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian aspek kognitif peserta didik, tetapi juga menekankan penguatan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, serta pembentukan karakter yang didukung oleh tata kelola pendidikan yang baik. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan perhatian pada dimensi pembelajaran dalam implementasi kurikulum PAI. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan kurikulum PAI berbasis cinta dengan prinsip-

prinsip *good governance*, terutama terkait partisipasi pemangku kepentingan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pendidikan, masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip partisipasi dan transparansi dalam pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Kapuas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala madrasah serta pemangku kepentingan pada dua madrasah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi dan transparansi dalam pengembangan kurikulum berlangsung melalui mekanisme musyawarah, forum dewan guru, serta sosialisasi kebijakan kepada orang tua siswa, sementara transparansi informasi didukung oleh pelaporan hasil belajar melalui sistem digital. Berdasarkan spektrum *Arnstein's Ladder of Citizen Participation*, tingkat partisipasi pemangku kepentingan berada pada tahap *consultation* menuju *partnership*, yang ditunjukkan oleh adanya ruang konsultasi dan penyampaian aspirasi dalam forum tata kelola yang baik, namun kewenangan strategis masih berada pada pimpinan madrasah. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik partisipasi telah melampaui tahap informatif, tetapi belum sepenuhnya mencapai pembagian kekuasaan yang setara. Dimensi lain, efektivitas implementasi kurikulum dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta kesiapan guru yang lebih merata di lingkungan madrasah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas guru, dukungan akses teknologi, serta pengembangan mekanisme partisipasi untuk mewujudkan tata kelola kurikulum madrasah yang lebih partisipatif dan transparan.

**Kata kunci :** *Good Governance*, Kurikulum PAI Berbasis Cinta, Partisipasi dan Transparansi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) di era kontemporer menuntut adanya pembaruan kurikulum dan *good governance* yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kasih sayang, multikulturalisme, dan karakter. Pendidikan Agama Islam yang menekankan nilai kasih sayang, karakter, dan multikulturalisme dipandang sebagai pendekatan holistik yang membentuk empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap orang lain, sebagaimana ditunjukkan dalam kurikulum PAI yang mengintegrasikan nilai multikultural untuk membangun toleransi dan harmoni sosial siswa (Anggraini et al., 2025). Konsep ini merujuk pada prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, nilai yang membimbing lembaga pendidikan untuk menciptakan strategi yang inklusif, membawa manfaat, dan berorientasi pada pelayanan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Ifqotus Zahroh et al., 2026), yang kemudian menjadi sebuah model lembaga pendidikan Islam terintegrasi dalam budaya sekolah yang menempatkan guru sebagai pembimbing dan role model dalam membentuk sikap humanis, toleran, ramah, dan demokratis pada siswa (Kurniawan, 2023). Hal ini sejalan dengan Nell Noddings, sebagaimana dikutip dalam Alia Hadid dkk, konsep *ethics of care*, menekankan pentingnya membangun lingkungan yang suportif dan penuh kepedulian sehingga memungkinkan terbentuknya hubungan yang bermakna, sekaligus tetap menghargai identitas budaya mereka (Hadid et al., 2025). Maka tujuan kurikulum berbasis cinta ialah usaha kurikulum untuk melahirkan insan yang

humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan (Madrasah et al., 2025). Misalnya, temuan di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 22 Rorotan menemukan pemahaman siswa tentang kepedulian lingkungan meningkat dari 62% menjadi 85% setelah implementasi kurikulum Cinta, ini terbukti efektif dalam memperkuat pendidikan karakter holistik berdasarkan kasih sayang dan kepemimpinan ekologis (Arham, 2025). Implementasi prinsip nilai tersebut berdampak positif, antara lain pertama, terbangunnya hubungan baik, rukun, dan damai antar siswa berbeda agama di sekolah, kedua, meningkatnya prestasi sekolah, ketiga, menurunnya tingkat kekerasan atau perundungan pada siswa (Giyono & Rusydi, 2024). Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang efektif dan berkelanjutan, yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang terus berkembang sekaligus menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan perilaku etis yang kuat (Norlianti et al., 2024).

Dalam hal tata kelola, penggunaan teknologi informasi, pengembangan profesional guru, dan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah strategi manajemen yang efektif. Teknologi informasi seperti platform e-learning dan Sistem Manajemen Informasi Sekolah (SMIS) meningkatkan akses ke pendidikan dan meningkatkan produktivitas administrasi (Dan & Kontemporer, 2024). Implementasi kurikulum berbasis cinta berhadapan dengan beberapa tantangan meliputi resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas dalam pengembangan materi (Danil et al., 2025). Transformasi kurikulum PAI ini, berjalan dalam konteks yang kompleks seperti kendala utama pada kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi budaya pembelajaran tradisional (Maulidin et al., 2025). Yang kemudian berdampak pada membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, sebagaimana temuan pada pesantren Modern Muhammadiyah Paciran, Lamongan, Jawa Timur, masih menghadapi kendala dalam keberlanjutan program. Kemandirian pendanaan yang masih memerlukan perencanaan yang lebih matang. Prinsip kesetaraan dalam distribusi sumber daya juga terdapat beberapa keluhan terkait ketimpangan (Imro Atus Soliha, Faridi, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh kualitas tata kelola madrasah yang mendukung implementasinya.

Konsep good governance merujuk pada Tata kelola yang baik ditandai dengan partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, adil. *“Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable”* (Undp, 2006). Yang berarti, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan serta keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan institusi publik, termasuk madrasah. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut pada pengembangan kurikulum di madrasah sering kali belum berjalan secara optimal. Dengan demikian. Artikel ini memfokuskan kajian pada dua prinsip utama, yaitu partisipasi dan transparansi, dengan argumen keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan nilai-

nilai dalam dimensi demokrasi (Addink, 2017), yang kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum PAI berbasis Cinta di madrasah.

Berdasarkan temuan-temuan studi terdahulu, Kurikulum dirancang untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai kebangsaan melalui pendekatan kontekstual dan pedagogis yang menyesuaikan dengan latar belakang sosial budaya peserta didik (Falikhatusun & Mudrikah, 2022). Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi pembelajaran, seperti pendekatan tematik-integratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, kolaborasi antarguru lintas mata pelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital berbasis Islam (Qur, 2025). Dipahami, kurikulum Pendidikan Agama Islam umumnya menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter, nilai kasih sayang, serta strategi pembelajaran yang mendukung pembentukan sikap toleran dan humanis pada peserta didik. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek konseptual kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas, sementara dimensi tata kelola lembaga madrasah yang berperan dalam mendukung implementasi kurikulum belum banyak dikaji secara mendalam. Secara khusus, keterkaitan antara pengembangan kurikulum PAI berbasis nilai kasih sayang dengan prinsip-prinsip tata kelola pendidikan (*good governance*), terutama yang berkaitan dengan partisipasi pemangku kepentingan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, masih relatif terbatas dalam kajian kurikulum. Kendati demikian, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desain pembelajaran, tetapi juga oleh sistem pengelolaan lembaga yang mampu melibatkan berbagai pihak secara transparan dan partisipatif. Jadi, artikel ini bertujuan untuk mengkaji integrasi prinsip tata kelola pendidikan dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis cinta, khususnya pada dimensi demokrasi yang menekankan praktik partisipasi dan transparansi sebagai bagian penting dari penerapan konsep *good governance* di madrasah.

Madrasah Tsanawiyah Jamiyatul Washliyah beralamat di Jalan Pemuda Km. 8.5 RT II dan Madrasah Tsanawiyah al-Muhajirin Antang beralamat di Jalan cilik Riwut Gg. Damai Rt.30 Rw.03 merupakan dua madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Ciri khas dari Madrasah Tsanawiyah Jamiyatul Washliyah ialah mempunyai program unggulan berupa Ujian Hafalan surah-surah pendek sebagai profil lulusan (kemenag Kapuas, 2025). MTs Al-Muhajirin Antang, mempunyai ciri khas Madrasah berbasis pondok pesantren yang aktif menjadi fasilitator ajang *Annual Competition of Al-Muhajirin Antang* bagi siswa tingkat daerah, Kabupaten Kapuas (Kemenag Kapuas, 2025).

Berdasarkan observasi kedua madrasah, dipahami dua madrasah tersebut memiliki ciri khas kurikulum PAI, pertama, penguatan dimensi spiritual dan karakter religius peserta didik dan kedua, orientasi pengembangan kompetensi dan karakter. Dua madrasah ini menunjukkan praktik pengembangan kurikulum PAI yang mengintegrasikan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi dan pembentukan karakter. Akan tetapi, praktik prinsip transparansi dan partisipatif belum

diintegrasikan secara komprehensif. Maka pertanyaan studi ini ialah bagaimana implementasi prinsip partisipatif dan transparansi dari konsep *Good Governance* dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis cinta Di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Kapuas?.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip-prinsip dari *good governance* dalam Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta di Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Kapuas, yakni berfokus pada implementasi prinsip partisipatif dan transparansi tata kelola yang baik. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan (*field research*), studi ini memperhatikan aspek etika penelitian melalui persetujuan partisipan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas informan, serta melakukan konfirmasi data melalui diskusi dengan rekan sejawat sebagai bagian dari proses validasi, data dikumpulkan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap *stakeholder* yakni kepala madrasah sebagai informan utama, wakamad kurikulum, wali siswa dan komite sekolah. Data dokumentasi diperoleh dari arsip madrasah yang meliputi surat undangan rapat pengembangan kurikulum, daftar hadir peserta musyawarah, serta notulen rapat.. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap validitas data menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi yang diperoleh dari informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MTs Jamiatul Al Washliyah dan Kepala MTs Al-Muhajirin Antang Kuala Kapuas, guru PAI dan *stakeholder*, data yang diperoleh direduksi dengan memfokuskan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum PAI Berbasis Cinta (KBC), serta implementasi prinsip partisipatif dan transparansi dalam pengembangan *good governance*. Kedua madrasah menyatakan bahwa perubahan kurikulum bermula dari pemberitahuan resmi Kementerian Agama mengenai transisi menuju Kurikulum Berbasis Cinta. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh guru melalui rapat awal tahun ajaran sebagai forum utama pembahasan kebijakan dan penyesuaian program madrasah. (MTs Al Muhajirin Antang, 2026; MTs Jamiyatul al Washliyah, 2026)

Pada tahap perencanaan, kepala madrasah bersama wakil kepala bidang kurikulum dan dewan guru melakukan koordinasi untuk menyesuaikan dokumen kurikulum dengan regulasi terbaru. Kondisi ini menunjukkan proses perencanaan kurikulum mencerminkan upaya penerapan prinsip partisipatif dan transparan dalam tata kelola yang baik di madrasah. Praktik ini menggambarkan adanya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan baik kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dewan guru bahkan keterlibatan pihak yayasan. Beberapa aktor ini

menandakan pengambilan keputusan berprinsip pada partisipasi dalam perspektif tata kelola yang baik. (MTs Al Muhajirin Antang, 2026). Proses yang sama terjadi di MTs Jamiatul Al Washliyah, penyusunan perangkat pembelajaran tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, dengan pendampingan dari pengawas madrasah dan seksi pendidikan madrasah (Penmad) dan melibatkan stakeholder seperti yayasan (MTs Jamiyatul al Washliyah, 2026).



**Gambar 1. Forum Musyawarah Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta di MTs Jamiyatul Washliyah**

*“Konsep Kurikulum PAI berbasis cinta, sejalan dengan nilai-nilai sebagaimana visi madrasah kami, maka kami memberikan rekomendasi agar pelaksanaannya tetapi diintegrasikan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yakni melibatkan stakeholder terakit”*(Yayasan MTs Jamiyatul Al Washliyah, 2026).

Dipahami, kedua madrasah yakni di MTs Al-Muhajirin Antang menunjukkan koordinasi perencanaan yang sistematis, sedangkan MTs Jamiatul Al Washliyah lebih menekankan pendampingan dari stakeholders dalam penyusunan perangkat pembelajaran.

Tahap pelaksanaan, implementasi kurikulum dijalankan oleh guru, terutama guru berstatus PNS dan guru yang telah bersertifikasi (MTs Jamiyatul al Washliyah, 2026), sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan yang menekankan suasana humanis dan dialogis.

*“Ketika sosialisasi kurikulum cinta telah diinformasikan ke madrasah, kami bersama kepala madrasah membahas persiapan perangkat pembelajaran dan adaptasi sesuai kondisi madrasah, kami juga diberi kesempatan untuk menyampaikan saran terkait metode mengajar sesuai dengan konsep kurikulum cinta.”*(Guru MTs Jamiyatul Al Washliyah, 2026)

Pernyataan tersebut, dipahami, adanya fasilitas konsultasi yang disediakan baik pihak yayasan ke kepala madrasah untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai konsep kurikulum cinta. Dengan demikian, guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum tetapi terlibat aktif dalam memberikan masukan

tentang bagaimana madrasah beradaptasi dengan kurikulum baru. Selain kegiatan pembelajaran di kelas, nilai-nilai cinta diinternalisasikan melalui pembiasaan keagamaan seperti salat berjamaah, doa dan zikir bersama, tilawah Al-Qur'an, serta penanaman sikap saling menghormati dalam interaksi sehari-hari (*MTs Al Muhajirin Antang, 2026*).

*Dalam pelaksanaan Kurikulum PAI Berbasis Cinta, kami sebagai guru berusaha menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati dalam proses pembelajaran. Tidak hanya melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui pembiasaan sikap di kelas, seperti menghargai pendapat teman, bekerja sama dalam kelompok, dan menjaga sikap sopan santun dalam berinteraksi"*(Guru MTs Al-Muhajirin Antang, 2026)

Pada siklus evaluasi, kedua madrasah melaksanakan evaluasi kurikulum melalui rapat semester dan refleksi bersama guru terhadap capaian pembelajaran siswa. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku peserta didik. Di MTs Jamiatul Al Washliyah, pelaporan hasil belajar telah menggunakan sistem Rapor Digital Madrasah (RDM) yang memuat indikator nilai berbasis cinta, termasuk pengisian komponen panca cinta. Akan tetapi, pelaksanaan evaluasi kurikulum secara menyeluruh masih menghadapi kendala, terutama dalam konsistensi penerapan oleh seluruh guru dan keterbatasan sarana pendukung berbasis teknologi (*MTs Jamiyatul al Washliyah, 2026*). Meskipun evaluasi kurikulum secara rutin dilakukan melalui rapat semester bersama dewan guru, proses evaluasi tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya didasarkan pada penggunaan indikator yang secara khusus dirancang untuk menilai implementasi kurikulum berbasis cinta secara sistematis.

Partisipasi berbagai unsur madrasah dalam proses tersebut merefleksikan prinsip partisipatif dalam kerangka good governance, di mana para pemangku kepentingan memiliki ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pendidikan. Kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, dewan guru, pengawas madrasah, serta wali murid dilibatkan melalui forum rapat dan pertemuan resmi. Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kurikulum. Komunikasi dan konsultasi antar kepala madrasah juga dilakukan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam penerapan KBC. Forum musyawarah dan konsultasi menciptakan pengambilan keputusan tidak hanya *top-down* akan tetapi, memeberikan ruang pengambilan secara *bottom-up* dalam pengambilan keputusan sekaligus menjadi forum bahwa kebijakan kurikulum merupakan kepemilikan bersama untuk diaplikasikan di madrasah.



**Gambar 2. Keterlibatan Stakeholder Dalam Forum Musyawarah**

Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta di madrasah dilaksanakan melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, guru, pengawas madrasah, serta perwakilan orang tua peserta didik. Forum tersebut menjadi wadah bagi para pihak untuk bertukar gagasan dan menyampaikan pandangan terkait penyusunan rancangan kurikulum, pengintegrasian nilai-nilai kasih sayang dalam proses pembelajaran, serta langkah-langkah implementasinya di lingkungan madrasah. Kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah dokumen administratif, seperti surat undangan rapat, daftar hadir peserta, dan catatan hasil musyawarah yang berfungsi sebagai bukti dokumentasi proses pengambilan keputusan (MTs Jamiyatul Washliyah Kabupaten Kapuas, 2025).

Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kurikulum secara terbuka dalam forum rapat guru dan pertemuan wali murid. Praktik ini menunjukkan adanya upaya madrasah untuk memberikan akses informasi mengenai pelaksanaan kurikulum kepada para pemangku kepentingan, walaupun penggunaan sistem digital sebagai sarana transparansi masih terbatas. Kebijakan perubahan kurikulum disosialisasikan secara langsung oleh kepala madrasah dan dibahas bersama dewan guru. Informasi mengenai pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran juga disampaikan kepada orang tua melalui laporan hasil belajar siswa. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada aspek pendanaan, sarana prasarana berbasis IT, serta penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik, yang memengaruhi kelancaran implementasi kurikulum secara menyeluruh. Digambarkan sebagai berikut,

**Tabel 1. Dimensi Demokrasi Good Governance Madrasah**

Aspek	MTs Jamiyatul Al Washliyah	MTs Al-Muhajirin Antang
Perencanaan	Perencanaan dilakukan melalui rapat awal tahun ajaran dengan mengacu pada regulasi Kementerian Agama serta	Perencanaan dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, dan guru

	pendampingan dari pengawas madrasah dan seksi Penmad	PAI untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan prinsip KBC.
<b>Pelaksanaan</b>	Diutamakan guru PNS dan sertifikasi, mengikuti regulasi (RPP, RDM)	Pelaksanaan pembelajaran menekankan pendekatan humanis dan dialogis, disertai pembiasaan religius seperti salat berjamaah, tilawah, dan pembentukan karakter berbasis kasih sayang
<b>Evaluasi</b>	Evaluasi kurikulum dilakukan secara komprehensif melalui rapat evaluasi berkala serta pemantauan capaian pembelajaran siswa yang terdokumentasi dalam sistem RDM	Evaluasi dilakukan melalui rapat semester dan refleksi bersama guru terhadap capaian akademik dan perkembangan sikap peserta didik
<b>Partisipasi Stakeholder</b>	Proses pengembangan kurikulum melibatkan guru, pengawas madrasah, seksi Penmad, serta wali murid dalam forum musyawarah dan konsultasi pendidikan	Guru, dewan guru, dan wali murid dilibatkan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan terkait implementasi kurikulum
<b>Transparansi Informasi</b>	Informasi terkait kebijakan kurikulum disampaikan secara terbuka melalui rapat dewan guru dan pertemuan orang tua siswa melalui sosialisasi kemenag Kapuas	Kebijakan dan pelaksanaan kurikulum disampaikan secara terbuka melalui forum musyawarah madrasah dan komunikasi dengan orang tua siswa
<b>Tantangan implementasi</b>	Keterbatasan sarana teknologi informasi, pendanaan, serta variasi tingkat pemahaman guru terhadap konsep kurikulum berbasis cinta	Keterbatasan waktu pembelajaran serta perbedaan karakter dan latar belakang peserta didik dalam proses internalisasi nilai-nilai kurikulum
<b>Strategi Penguatan good governance</b>	Penguatan kerjasama antar guru, peningkatan konsistensi implementasi kurikulum, serta penguatan visi dan misi madrasah berbasis nilai kasih sayang	Pendekatan personal kepada siswa, peningkatan komunikasi dengan orang tua, serta penguatan budaya sekolah yang humanis dan dialogis

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan prinsip partisipatif dalam pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur penting di lingkungan madrasah. Kepala madrasah, guru, pengawas, serta wali murid turut berkontribusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Rapat dewan guru berfungsi sebagai wadah utama untuk bermusyawarah, menyampaikan pendapat, serta merumuskan langkah-langkah implementasi kebijakan kurikulum. Pihak madrasah juga menjalin komunikasi dengan *steakholder* guna menyosialisasikan program serta arah kebijakan pendidikan yang akan dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di madrasah berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses dialog dan pertukaran gagasan dalam pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta.

Prinsip keterbukaan (transparansi) tampak dari cara madrasah menyampaikan informasi terkait perubahan dan pelaksanaan kurikulum secara terbuka dalam forum resmi. Kepala madrasah memberikan penjelasan langsung kepada para guru mengenai kebijakan yang diterapkan serta menyediakan ruang dialog untuk klarifikasi dan masukan. Keterbukaan tersebut juga tercermin dalam kegiatan evaluasi berkala serta penyampaian laporan hasil belajar siswa yang telah memanfaatkan sistem digital sebagai media informasi. Praktik tersebut menggambarkan upaya madrasah untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang terbuka dan bertanggung jawab, dengan menyediakan akses informasi mengenai kebijakan kurikulum kepada guru maupun orang tua peserta didik. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Tata kelola yang baik ditandai dengan partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, adil. *“Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable (Undp, 2006).”* Sherry Arnstein mengemukakan model partisipasi masyarakat yang dikenal dengan *Ladder of Citizen Participation*, yang menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai spektrum bertingkat, mulai dari partisipasi yang bersifat simbolik hingga pada tingkat kemitraan dan kontrol warga (*citizen control*) dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Berdasarkan hasil penelitian, pola partisipasi yang berkembang di kedua madrasah dapat dikategorikan berada pada spektrum antara model konsultatif (*consultation*) dan kemitraan (*partnership*). Jika melihat tingkat partisipasi di kedua madrasah yakni keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Cinta dapat dikategorikan berada pada spektrum antara tahap konsultatif (*consultation*) dan kemitraan (*partnership*)(Arnstein's Ladder, 1969). Hal ini tercermin dari adanya ruang dialog melalui forum musyawarah serta keterlibatan guru dalam penyusunan perencanaan kurikulum. Akan tetapi, penentuan kebijakan kurikulum secara strategis tetap berada pada otoritas kepala madrasah, sehingga tingkat partisipasi tersebut belum sampai pada tahap pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) ataupun kontrol penuh oleh para pemangku kepentingan.

Model partisipasi konsultatif (*consultation*) merupakan bentuk pelibatan masyarakat melalui penyampaian pendapat dalam forum musyawarah atau pertemuan. Tahap ini dapat menjadi langkah awal menuju partisipasi yang lebih luas, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa aspirasi yang disampaikan akan memengaruhi keputusan akhir apabila kewenangan tetap berada pada pihak pengambil kebijakan. (Arnstein, 1969). Partisipasi ini dapat berkembang pada pendekatan *Collaborative Governance*, model pengelolaan layanan publik tersebut telah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Mahar Hamzah Malik, Sukmawati sukma, 2025).

Dimensi lain dalam implementasi *good governance terhadap* Kurikulum PAI Berbasis Cinta Di Madrasah ialah, ditemukan, bahwa efektivitas pelaksanaan kurikulum turut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, antara lain rendahnya penguasaan teknologi oleh sebagian guru, minimnya pelatihan khusus mengenai kurikulum berbasis cinta, serta keterbatasan fasilitas teknologi informasi yang tersedia di madrasah. Tantangan lain, seperti keberagaman karakter dan latar belakang peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri dalam menginternalisasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dalam teori implementasi kebijakan Publik oleh George C. Edwards III, keberhasilan implementasi terdapat pada Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berkontribusi atau membatasi implementasi kebijakan publik (Edwards, 1980). Dalam konteks kasus ini, aspek komunikasi terlihat melalui proses sosialisasi kurikulum kepada guru dalam forum rapat dan koordinasi madrasah. Aspek sumber daya tercermin dari keterbatasan fasilitas teknologi dan kurangnya pelatihan terkait implementasi Kurikulum PAI Berbasis Cinta. Selain itu, disposisi guru dalam merespons perubahan kurikulum turut memengaruhi pelaksanaannya, sedangkan struktur birokrasi tampak dari peran kepala madrasah sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan kurikulum di madrasah. Berdasarkan keempat indikator oleh George C. Edwards III tersebut, indikator disposisi masih kurang baik yaitu terlihat dari kebutuhan analisa permintaan disposisi jabatan yang belum tercapai serta pemberian insentif berupa *reward* yang belum direalisasikan (Wati, 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Di Tata kelola kurikulum madrasah telah memenuhi sebagian prinsip *good governance*, tetapi belum mencapai tingkat kemitraan yang setara. Proses pengambilan keputusan strategis masih berada pada otoritas kepala madrasah sehingga pola partisipasi yang terbentuk lebih bersifat konsultatif. Prinsip transparansi tata kelola, madrasah berupaya menyediakan keterbukaan informasi terkait kebijakan kurikulum serta perkembangan belajar siswa melalui berbagai forum komunikasi resmi dan penyampaian laporan kepada orang tua. Namun, pelaksanaan kurikulum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan fasilitas teknologi, kapasitas profesional sebagian guru, serta keragaman latar belakang peserta didik. Dengan demikian, rekomendasi terkait peningkatan

kompetensi sumber daya manusia dan penguatan dukungan infrastruktur teknologi menjadi langkah penting untuk mendorong pengelolaan kurikulum madrasah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Artikel ini memiliki keterbatasan, antara lain kajian belum menganalisis implemetasi kebijakan lain seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, keterbatasan analisis tata kelola kurikulum madrasah yang lebih luas dan belum mengukur secara kuantitatif tingkat keberhasilan implementasi kurikulum di madrasah. Penelitian selanjutnya disarankan meneliti implementasi tata kelola kurikulum madrasah dengan memasukkan dimensi lain, prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam teori *good governance*. Studi berikutnya dapat memperluas cakupan lokasi penelitian pada lebih banyak madrasah mengenai praktik tata kelola kurikulum. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara lebih objektif tingkat keberhasilan implementasi kurikulum di madrasah

## DAFTAR PUSTAKA

- Addink, G. H. (2017). *Tata Kelola Yang Baik: Pentingnya dalam Praktik, Teori dan*. 1, 1–31.
- Anggraini, M., Nadlir, N., & Made, E. (2025). Implementing a Holistic Islamic Religious Education Curriculum Based on Multicultural Values. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2 SE-Articles), 308–327. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v11i2.454>
- Arham, R. (2025). *Model Kurikulum Cinta di MIN 22: Ekoteologi , Moderasi , Nasionalisme*. 4(1), 89–96.
- Arnstein, S. R. (1969). *LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION This publication is made available in the context of the history of social work project. Please do get in touch with us. Deze publicatie wordt beschikbaar gesteld in het kader van de canon sociaal werk. Zie www.canonsociaalwerk.eu Het is onze wens de rechten van auteurs en uitgevers te respecten. Mocht je denken dat we daarin iets fout doen , gelieve ons dan te contacteren .* (July).
- Arnstein's Ladder. (1969). *Degrees of Citizen Participation*.
- Dan, M., & Kontemporer, T. (2024). *TATA KELOLA PENDIDIKAN ISLAM : STRATEGI*. 02(01), 36–41. <https://doi.org/10.61553/ascent.v2i1.128>
- Danil, H., Syafaruddin, B., & Sarda, M. (2025). *Insertion of a Love-Based Curriculum in Multicultural Islamic Religious Education*. 4(4), 1323–1335.
- Dokumen Musyawarah. (2025). *Madrasah tsanawaiyah Jamiyatul washliyah*.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Falikhatun, F., & Mudrikah, S. (2022). Intellectual Capital Dimensions and Profitability of Sharia Banking in OIC Countries. ... *Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Giyono, A., & Rusydi, I. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Karakter dalam Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *JELIN: Journal of Education and Learning ....*

- Guru MTs Al-Muhajirin Antang. (2026).  
Guru MTs Jamiatul Al Washliyah. (2026).
- Hadid, A., Hos, R., & Hauber-Özer, M. (2025). Empathy in Action: Nurturing Sustainable Educational Change through Nel Noddings' Ethics of Care. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 12(2 SE-Original Manuscript), 1–10. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2438>
- Ifqotus Zahroh, Nur Hayati, Sukron, & Syaiful Hadi. (2026). Strategi Pendidikan Berlandaskan Tauhid, Amanah dan Rahmatan Lil-'Alamin. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1 SE-Articles), 508–516. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.490>
- Imro Atus Soliha, Faridi, T. (2024). Building Transparency and Accountability: Implementation of Good Governance in Modern Islamic Boarding Schools of Muhammadiyah Paciran. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 4(3), 1326–1339.
- Kemenag Kapuas. (2025). *Annual Competition of Al-Muhajirin Antang Part VII*. Kalteng.Kemenag.Go.Id. <https://kalteng.kemenag.go.id/kapuas/cetak/536423/MIN-1-Kapuas-Raih-Juara-Umum-Annual-Competition-Part-VII-Pondok-Al-Muhajirin-Antang>
- kemenag Kapuas. (2025). *Madrasah Tsanawiyah Jamiyatul Washliyah lakukan Ujian Munaqasah surah pendek*. <https://kalteng.kemenag.go.id/kapuas/berita/530676/MTs-Jamiyatul-Washliyah-Laksanakan-Ujian-Munaqasah-Hafalan-Surah-Pendek>
- Kurniawan, M. R. (2023). *Rahmatan lil Alamin Islamic Value Education Model based on Muhammadiyah School Culture*. 15(2), 269–290.
- Madrasah, D. K., Islam, D. J. P., Kementerian Agama Republik Indonesia, & 2025. (2025). *Panduan Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah*.
- Mahar Hamzah Malik, Sukmawati sukma, A. H. (2025). : *Journal of Government Studies Vol.5 No.1 2025 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online): 2807-758X*. 5(1), 40–53.
- Maulidin, S., Muhammad Latif Nawawi, & Jatmiko. (2025). STUDI LITERATUR: TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR. *EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan*, 5(1), 38–48.
- MTs Al Muhajirin Antang. (2026). 2–3.
- MTs Jamiyatul al Washliyah. (2026). 2–4.
- Norlianti, N., Aliyah, S. R., & Zainuri, H. (2024). *Principles of Islamic Religious Education Curriculum Development*. 02(December), 206–214.
- Qur, I. A. I. A.-. (2025). STRATEGI INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM KURIKULUM Siti Rohmaniah , Marsino dan Wakib Kurniawan: Strategi Integrasi Nilai-Nilai Islam Jurnal Taujih Jurnal Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Siti Rohmaniah , Marsino dan Wakib Kurniawa.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 6 (2026) 275 – 288 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691  
DOI: 10.47476/reslaj.v8i6.12097

*Jurnal Taujih Jurnal Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam,*  
7(01), 72–85.

Undp. (2006). *Governance for sustainable human development A UNDP policy document -*.

Wati, N. K. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENTPADA  
DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN DI KABUPATEN GOWA.  
*Gema Kampus" IISIP YAPIS Biak, 17(2), 36–44.*

*Yayasan MTs Jamiatul Al Washliyah. (2026).*